

**PENGELOLAAN PEMELIHARAAN JALAN POROS  
MAKROMAN - SULTAN SULAIMAN KOTA SAMARINDA  
OLEH DINAS PUPR-PERA PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

**Refi Rizki Tri Pangestu, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 4, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Poros Makroman - Sultan Sulaiman Kota Samarinda oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur

Pengarang : Refi Rizki Tri Pangestu

NIM : 1802015007

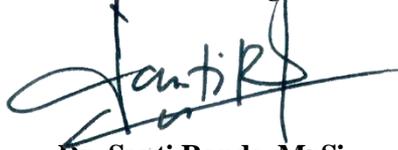
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 20 Agustus 2023

**Pembimbing,**



**Dr. Santi Rande, M. Si.**  
**NIP 19751001 200604 2 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	
<b>Volume</b> : 11	
<b>Nomor</b> : 4	
<b>Tahun</b> : 2023	
<b>Halaman</b> : 808-820	

**Koordinator Program Studi**  
**Administrasi Publik**

**Dr. Fajar Apriani, M.Si.**  
**NIP 19830414 200501 2 003**

# PENGELOLAAN PEMELIHARAAN JALAN POROS MAKROMAN - SULTAN SULAIMAN KOTA SAMARINDA OLEH DINAS PUPR-PERA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Refi Rizki Tri Pangestu <sup>1</sup>, Santi Rande <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengelolaan pemeliharaan jalan poros Makroman-Sultan Sulaiman Kota Samarinda oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan ini. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada pengelolaan pemeliharaan jalan dilihat dari perspektif perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta melihat faktor-faktor penghambatnya. Sumber data primer diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta warga terdampak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman, teknik analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemeliharaan masih rendah, dan penggunaan aplikasi teknologi belum optimal. Meskipun pengorganisasian di Dinas PUPR-PERA cukup baik, kualitas perbaikan jalan perlu ditingkatkan. Pengawasan dari pemerintah sudah baik, namun melibatkan masyarakat dalam pemantauan kualitas pemeliharaan jalan perlu ditingkatkan. Disarankan agar pemerintah lebih mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui teknologi yang lebih efektif dan memperbaiki kualitas pelaksanaan pemeliharaan jalan. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota juga perlu ditingkatkan untuk respons yang lebih cepat terhadap masalah jalan rusak. Temuan ini memberikan panduan berharga untuk meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kalimantan Timur.*

**Kata Kunci :** *Manajemen organisasi, pengelolaan pemeliharaan jalan*

## **Pendahuluan**

Jalan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, memberikan dampak signifikan pada berbagai aktivitas harian. Sebagai

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [refiratipa7@gmail.com](mailto:refiratipa7@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

infrastruktur transportasi, jalan tidak hanya mendukung pendidikan, perdagangan, dan ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi bagian krusial dari sistem transportasi nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Jalan berperan dalam mendukung berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Pembangunan jalan juga berkontribusi dalam upaya mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan, mengedepankan keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan, serta memperkuat persatuan dan keamanan bangsa. Melalui pengaturan pola tata ruang, pembangunan jalan turut mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Kondisi jalan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi calon Ibu Kota Negara, mengalami fluktuasi signifikan. Presiden Joko Widodo telah mengusulkan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, namun ini harus disertai dengan infrastruktur jalan yang baik. Saat ini, banyak jalan di Kalimantan Timur masih mengalami kerusakan yang perlu diperhatikan (Kompas, 2019).

Di Provinsi Kalimantan Timur, kondisi jalan dapat dibagi menjadi empat kelompok: baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Pada tahun 2014, terdapat 454,65 km jalan dalam kondisi baik. Angka ini melonjak tajam menjadi 2770,87 km pada 2015, dan kemudian menurun menjadi 93,75 km pada tahun 2020. Jalan dalam kondisi sedang juga mengalami peningkatan, dari 382,66 km pada 2014 menjadi 2823,12 km pada 2015, dan mencapai 456,25 km pada 2020. Sementara itu, jalan yang rusak mengalami peningkatan yang signifikan, dari 275,64 km pada 2014 menjadi 2072,66 km pada 2015, dan turun menjadi 195,11 km pada 2020. Kondisi jalan yang rusak berat juga mengalami tren yang serupa, naik dari 471,93 km pada 2014 menjadi 1117,73 km pada 2015, dan mencapai 149,97 km pada 2020. Data ini menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dalam semua jenis kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Badan Pusat Statistik, 2020).

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat penting dalam mengelola kondisi jalan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dinas ini bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, dan penataan infrastruktur serta prasarana di sektor pekerjaan umum. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini sangat tergantung pada kinerja aparatur pemerintah dalam organisasi ini. Efisiensi dan efektivitas kerja aparatur merupakan faktor kunci dalam mencapai hasil yang positif. Sebaliknya, kinerja yang kurang optimal dapat berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum perlu terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja aparaturnya guna meraih sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dijelaskan bahwa pemeliharaan jalan melibatkan sejumlah langkah untuk merawat, memperbaiki, dan mencegah

kerusakan pada jalan. Fokusnya adalah menjaga agar kondisi jalan tetap optimal dalam melayani pergerakan kendaraan, sehingga usia pakai jalan sesuai dengan perencanaan dapat terwujud. Oleh karena itu dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada Gubernur dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan pemukiman.

Manajemen atau pengelolaan memiliki arti yang serupa. Secara etimologi, istilah "pengelolaan" berasal dari kata "kelola," yang merujuk pada pengurusan atau penanganan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu (Rohmann, 2017). Menurut perspektif Terry, pengelolaan identik dengan manajemen, sehingga pengelolaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Semua langkah ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan ilmu dan seni manajemen (Rohman, 2017).

Penelitian ini berfokus pada Kelurahan Makroman di Provinsi Kalimantan Timur karena kondisi yang memprihatinkan dari jalan poros Makroman dan Sultan Sulaiman yang menghubungkan daerah ini dengan Kota Samarinda. Meskipun sebagian jalan telah diaspal, namun kerusakan sering terjadi karena kualitas aspal yang tidak tahan lama. Sebagai jalur utama bagi warga Makroman menuju Kota Samarinda, kondisi jalan yang buruk ini mengakibatkan masalah seperti jalanan licin saat hujan dan berdebu saat kemarau. Dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintas setiap hari, pembaruan jalan ini memerlukan perhatian penuh dari pemerintah. Selain itu, ada masalah risiko longsor yang membuat jalan menjadi satu arah dan insiden kecelakaan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, tindakan perbaikan dan pemeliharaan yang serius diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalan ini.

Hasil observasi penulis terhadap Dinas PUPR-PERA terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan rusak di Makroman mengungkapkan beberapa temuan. Pertama, Dinas PUPR tidak melakukan pemantauan teratur terhadap perbaikan jalan rusak, yang mengakibatkan kerusakan jalan semakin parah karena kurangnya pengawasan di daerah tersebut. Kedua, kondisi jalan utama sangat buruk dan tampaknya ini karena laporan-laporan masyarakat tentang jalan rusak tidak diproses dengan baik. Kemungkinan adanya masalah internal, seperti keterbatasan anggaran, membuat Dinas PUPR harus memilih prioritas mana yang harus segera diperbaiki.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana pengelolaan pemeliharaan jalan poros Makroman-Sultan Sulaiman Kota Samarinda oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan pemeliharaan jalan

poros Makroman-Sultan Sulaiman Kota Samarinda oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur?.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen***

Dalam suatu Instansi atau Pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam pelayanan yang baik kepada masyarakat mengingat kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tinggi sehingga aparatur pemerintah harus memiliki kualitas pelayanan yang baik. Para ahli menyatakan bahwa Pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya mengacu pada proses mengurus atau menangani suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu (Rohman, 2017).

Manajemen merupakan fungsi yang bertujuan mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu guna mencapai tujuan bersama (Sadikin dkk, 2020). Terry menyatakan bahwa manajemen berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan partisipasi kegiatan orang lain (Sadikin dkk, 2020).

Sedikit berbeda Afandi (2018) menjelaskan Manajemen dapat diartikan sebagai kolaborasi antar karyawan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses ini berperan penting dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan optimal menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif.

Dalam pandangan Hasibuan (2013), manajemen terdiri dari enam unsur yang dikenal sebagai 6M, yaitu *man, money, method, materials, machines, dan market*. Dalam sebuah organisasi, terdapat pula beberapa fungsi manajemen yang berperan penting dalam mencapai tujuan dan kinerja yang diharapkan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut menjadi landasan dalam proses manajemen untuk mencapai kesuksesan organisasi. Pandangan Terry dalam Rohman (2017) mengenai fungsi-fungsi manajemen lazim menggunakan akronim POAC, yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan)  
Perencanaan merupakan suatu proses fundamental dalam manajemen yang dilakukan untuk merencanakan kegiatan di masa depan dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian)  
Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas ke unit yang lebih kecil, penugasan tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, alokasi sumber daya, dan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.
- c. *Actuating* (pengaktualisasian)  
Dalam pengarahan, karyawan harus diarahkan agar mau bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan diibaratkan sebagai

kunci starter mobil yang memulai mobil untuk berjalan, dan demikian pula dengan proses manajemen, pengarahan harus diterapkan agar proses manajemen dapat berjalan dengan lancar.

d. *Controlling* (pengawasan)

Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, tahap selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan sangat erat hubungannya dengan fungsi perencanaan dan keduanya saling melengkapi

Para ahli mengakui bahwa fungsi-fungsi manajemen memiliki peran yang krusial dalam organisasi, terutama dalam dinas pemerintah. Penerapan fungsi-fungsi manajemen, seperti yang dijelaskan oleh Terry (*POAC - Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), menjadi kunci penting agar dinas pemerintah dapat beroperasi secara efektif. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada salah satu fungsi manajemen yang disebutkan oleh Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dinas PUPR harus memiliki perencanaan yang matang untuk pemeliharaan jalan di wilayah Makroman dan jalan Sultan Sulaiman. Selain itu, pengorganisasian yang melibatkan berbagai pihak juga diperlukan untuk menjalankan proses pemeliharaan jalan dengan baik.

### ***Pemeliharaan Jalan***

Adanya pemeliharaan jalan dapat mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan (Yulianti & Hasanah, 2018).

Menurut Pasal 84 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengenai jalan, pemeliharaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan jalan melibatkan upaya perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan pada jalan.
2. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat dan memperbaiki kerusakan pada ruas-ruas jalan yang memiliki kondisi pelayanan yang stabil. Kondisi pelayanan yang stabil mengacu pada ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang diperhitungkan dan memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Pemeliharaan berkala jalan melibatkan penanganan terhadap setiap kerusakan yang telah diperhitungkan dalam desain, dengan tujuan untuk mengendalikan penurunan kondisi jalan agar tetap dalam kondisi stabil sesuai dengan rencana.

Menurut *National Association of Australian State Road Authorities* (NAASRA) dalam Yuliani dkk (2018), pemeliharaan jalan dapat didefinisikan sebagai segala jenis pekerjaan yang diperlukan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi jalan agar tetap dalam keadaan baik, atau pekerjaan yang terkait dengan keduanya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah mencegah penurunan kualitas jalan dengan kecepatan perubahan yang cepat setelah konstruksi jalan selesai dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan menjelaskan klasifikasi program pemeliharaan yang dipakai dalam Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan rutin  
Pemeliharaan rutin adalah aktivitas perawatan yang dilakukan secara terus-menerus dan tersebar di seluruh jaringan jalan dengan skala pekerjaan yang cukup kecil. Melalui pemeliharaan rutin ini, diharapkan tingkat penurunan kondisi struktural perkerasan dapat mengikuti pola yang telah diperkirakan pada tahap desain.
- b. Pemeliharaan periodik  
Pemeliharaan periodik adalah jenis perawatan yang dilakukan secara menyeluruh pada satu atau beberapa seksi jalan dalam jangka waktu beberapa tahun. Fokus utama dari pemeliharaan periodik adalah menjaga kondisi fungsional jalan sesuai dengan rencana selama masa layanannya, tanpa meningkatkan nilai struktural perkerasan.
- c. Rehabilitasi atau Peningkatan  
Peningkatan jalan merupakan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki integritas struktur perkerasan, yang melibatkan peningkatan nilai struktural dengan menambahkan lapisan tambahan struktural. Peningkatan jalan dapat dilakukan ketika masa layanannya habis, terdapat kerusakan awal akibat faktor luar seperti cuaca, atau terjadi kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan rekonstruksi.
- d. Rekonstruksi  
Apabila perkerasan lama telah mencapai kondisi yang sangat buruk, pemberian lapisan tambahan tidak akan memberikan efek yang efektif, dan pada umumnya, dibutuhkan kegiatan rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi ini bertujuan untuk melakukan penanganan pada jalan sehingga kelasnya dapat ditingkatkan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan jalan adalah suatu kegiatan yang melibatkan pencegahan, pemeliharaan, dan perbaikan untuk menjaga kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi umur rencana yang telah ditetapkan, sehingga lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.

### ***Definisi Konsepsional***

Pengelolaan pemeliharaan jalan adalah usaha untuk mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengarahkan kerja kolektif menuju pencapaian tujuan pemeliharaan jalan. Secara menyeluruh, pengelolaan pemeliharaan jalan bertujuan untuk mencapai pemeliharaan jalan dengan standar kualitas yang memadai, dengan akibatnya memberikan kepuasan kepada masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Metode ini melibatkan prosedur pemecahan masalah dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian saat ini dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fokus penelitian pada penelitian kali ini adalah (1) Pengelolaan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang diukur melalui *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan). (2) Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan pemeliharaan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini, Sumber data primer terdiri di dapatkan dari hasil wawancara Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat terdampak serta data sekunder berasal dari seperti buku-buku, arsip, dan internet. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015), pendekatan ini melibatkan tahapan pengumpulan data, pengkondensasian data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pengelolaan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan timur***

#### ***a. Planning***

Menurut Akbar dkk. (2021), tahap perencanaan bertujuan untuk menetapkan tindakan yang harus diambil, bagaimana melaksanakannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi program. Untuk mencapai tujuan organisasi, rencana yang terperinci diperlukan, memfasilitasi pelaksanaan tugas di seluruh bagian organisasi yang mendukung pencapaian tujuan. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dalam tahap perencanaan menggunakan dua metode, yaitu survei langsung dua kali dalam setahun pada Januari dan Oktober, serta mengumpulkan aduan masyarakat melalui aplikasi SIPEJABAT, sebuah sistem informasi yang telah disediakan.

Namun, ada temuan bahwa metode pengumpulan aduan masyarakat dalam tahap perencanaan belum mencapai hasil yang optimal. Kurangnya sosialisasi tentang aplikasi pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menjadi penyebab utama. Tidak ada forum komunikasi yang disediakan oleh Dinas PUPR-PERA Kaltim untuk interaksi dengan masyarakat. Menurut Abe seperti yang dikutip oleh Laily (2015), perencanaan partisipatif masyarakat berdampak signifikan dalam pembangunan, termasuk menghindari manipulasi, meningkatkan keadilan perencanaan, serta memperkuat kesadaran dan kapasitas politik masyarakat. Oleh karena itu, proses perencanaan dalam pemeliharaan jalan

harus lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, mengingat mereka yang merasakan dampak langsung jika ada kerusakan jalan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pemeliharaan jalan dilakukan melalui survei lapangan oleh tim satgas dan laporan masyarakat melalui aplikasi SIPEJABAT. Namun, perencanaan ini belum optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Penggunaan aplikasi SIPEJABAT juga kurang maksimal, ditunjukkan oleh jumlah pengguna yang rendah dan kurangnya sosialisasi yang efektif.

#### **b. Organizing**

*Organizing* adalah proses untuk memastikan ketersediaan semua sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk menerapkan rencana dan mencapai tujuan organisasi (Dakhi, 2016). Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, mereka telah mengimplementasikan proses pengorganisasian ini melalui struktur hingga tingkat wilayah. Ada tiga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang ditempatkan di berbagai wilayah. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I berpusat di Kota Balikpapan dan mencakup Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II berpusat di Kota Samarinda dan mencakup Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III berpusat di Tanjung Redeb dan mencakup Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.

Dalam konteks lain, terdapat berbagai bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sumber daya air dan cipta karya. Khususnya dalam pemeliharaan jalan, Dinas ini membentuk tim satuan tugas yang terdiri dari tim perencanaan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur telah cukup baik dengan membagi struktur secara terperinci per wilayah dan per bidang. Selain itu, keberadaan satuan tugas yang terdiri dari tim perencanaan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan dalam proses pemeliharaan jalan juga menjadi hal positif.

#### **c. Actuating**

*Actuating* adalah proses untuk menggerakkan dan mengkoordinasi semua anggota organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai rencana (Akbar dkk., 2021). Pada tahap ini, seluruh fungsi organisasi bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan dengan efisien. Dalam Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan

Timur, mereka telah melakukan komunikasi intens di internal organisasi untuk memastikan penggerakan yang efektif dan sinergi antara seluruh lini dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan tim melalui rapat formal maupun nonformal. Setiap tahunnya, anggaran telah disiapkan untuk pemeliharaan jalan, meskipun prioritas harus dipilih untuk memaksimalkan anggaran. Ini mempengaruhi metode pengecoran, yang melibatkan aspal atau beton sesuai dengan padatnya lalu lintas yang akan diperbaiki. Pemeliharaan jalan dijadwalkan pada bulan Maret dan Desember. Namun, hasilnya masih dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat dan pemerintah, yang menganggap pemeliharaan masih kurang responsif dan kualitas perbaikan jalan belum memadai. Faktor ini terkait dengan perencanaan pemeliharaan jalan yang hanya dilakukan dua kali setahun, sementara intensitas kendaraan tinggi membuat kerusakan cepat muncul kembali.

Secara keseluruhan, penggerakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur terbilang baik, melibatkan komunikasi internal yang intensif dan penggunaan anggaran melalui metode pengecoran yang sesuai. Meski demikian, pelaksanaan pemeliharaan jalan masih dinilai kurang optimal oleh masyarakat karena ketidakteraturan dalam pemeliharaan dan kualitas perbaikan jalan yang belum memadai.

#### **d. Controlling**

Pemantauan dan pengendalian (*controlling*) adalah proses berkelanjutan untuk mengamati pelaksanaan aktivitas sesuai rencana, serta melakukan perbaikan bila perlu. Dalam manajemen, pengawasan berperan dalam memastikan tugas, wewenang, dan peran para personel sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, pengawasan dilakukan melalui tim pengawas yang bekerja secara profesional. Setiap tim memiliki sumber daya manusia yang berbeda untuk memastikan pengawasan yang efektif.

Dampaknya, kualitas jalan provinsi terus meningkat setiap tahun, sesuai dengan fungsi pengendalian yang meliputi penentuan standar kinerja, pengukuran kinerja masa lalu, perbandingan dengan standar yang ditetapkan, dan tindakan perbaikan (Kamal, 2019). Pengawasan ini mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berkelanjutan.

Namun, dalam pengawasan ini, masyarakat masih merasa minim terlibat dan memiliki akses terbatas untuk mengawasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan melalui media yang tepat. Diperlukan usaha bersama untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan peran lebih besar dalam pengawasan (Rusli, 2015).

Meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan yang baik, perlu diperhatikan kembali fungsi pengawasan ini. Meskipun ada tim pengawas dan

kualitas jalan terus ditingkatkan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan harus ditingkatkan karena merekalah yang merasakan dampak langsung dari pemeliharaan jalan.

***Faktor Penghambat Pengelolaan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur***

Dalam pemeliharaan jalan, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang belum optimal. Henriyani (2018) menjelaskan bahwa kontrol dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah agar visi dan misi organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Melalui terciptanya lingkungan yang terbuka, jujur, partisipatif, dan bertanggung jawab, akan terbentuk rasa saling percaya yang mendorong tercapainya tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terus-menerus dan berkelanjutan terhadap kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, faktor penghambat lain dalam pemeliharaan jalan adalah kecenderungan untuk melakukannya secara sporadis. Kamil dkk. (2014) telah membahas tentang konsep keberlanjutan dalam pemeliharaan jalan yang menjadi perbincangan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks manajemen pemeliharaan, Sarpin & Yang (2012) menunjukkan bahwa mengintegrasikan konsep keberlanjutan ke dalam manajemen real estat dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengatasi masalah terkait. Jika pemeliharaan jalan tidak dilakukan secara efektif, kondisi jalan akan semakin memburuk. Otoritas Jalan melaksanakan pemeliharaan berkala berdasarkan periode desain jalan. Namun, Choudhary & Agarwal (2013) mencatat bahwa metode pemeliharaan jalan saat ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dibandingkan dengan metode pemeliharaan jalan lainnya. Prioritas tindakan pemeliharaan jalan biasanya ditentukan oleh faktor-faktor seperti kondisi jalan saat ini, tingkat kerusakan, potensi kerusakan lebih lanjut, volume lalu lintas, dan faktor lainnya.

Faktor penghambat lainnya adalah kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Febrian (2015) menjelaskan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan sangat penting dalam menjalankan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tantangan koordinasi pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dapat dialihkan antar tingkatan pemerintahan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pemeliharaan jalan dalam penelitian ini. Pertama, partisipasi masyarakat yang belum maksimal dikarenakan terbatasnya aksesibilitas untuk memberikan laporan kepada pemerintah dan kurangnya sosialisasi. Kedua, pemeliharaan jalan yang tidak konsisten, dengan survei

kelayakan jalan hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Ketiga, adanya kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota juga menjadi hambatan dalam pemeliharaan jalan.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Dalam pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur terkhusus pada jalan poros Makroman-Sultan Sulaiman di Kota Samarinda, pendekatan POAC tercermin dalam beberapa indikator. Perencanaan dilakukan melalui survei lapangan dan aplikasi SIPEJABAT, meski masih perlu perhatian lebih pada partisipasi masyarakat. Pengorganisasian terjadi dengan efisien melalui struktur wilayah dan tim satuan tugas. Penggerakan terlihat baik melalui komunikasi internal dan pemakaian anggaran efektif, walaupun mobilisasi perlu lebih kontinyu. Pengawasan sudah cukup baik, namun perlu perhatian lebih terhadap laporan masyarakat.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur pada jalan poros Makroman-Sultan Sulaiman di Kota Samarinda yaitu bentuk partisipasi masyarakat yang masih rendah karena minimnya komunikasi dan penggunaan aplikasi laporan. Pemeliharaan jalan juga perlu lebih berkelanjutan karena survei lapangan hanya dilakukan dua kali setahun. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota perlu diperkuat, termasuk dalam pelaporan rusak yang responsif. Dalam konteks ini, potensi peningkatan terletak pada partisipasi masyarakat, keberlanjutan pemeliharaan, dan koordinasi yang lebih baik.

### ***Saran***

Setelah menelaah kesimpulan dalam proses pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR-PERA Kaltim, maka dari itu perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat sekitar yang terkena secara langsung dampak pemeliharaan jalan. Dengan memasifkan sosialisasi aplikasi SIPEJABAT sebagai media pelaporan secara online kepada pemerintah yang telah dimiliki oleh Dinas PUPR-PERA. Selain itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melakukan inovasi melalui pembuatan tim komunikasi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Melalui tim komunikasi yang ditempatkan dekat dengan masyarakat, seperti di keluarahan atau pada kantor balai desa disekitar kawasan pemeliharaan jalan.
2. Tidak maksimalnya proses pemeliharaan jalan yang hanya dilakukan secara momentum, maka perlu dirumsukan kembali proses pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR-PERA Kaltim. Dengan bekerja secara responsif ketika ada

laporan/aduan masyarakat terkait jalan langsung di tindaklanjuti. Membuat sistem pemeliharaan jalan lebih taktis dan dinamis, tidak hanya melalui pemeliharaan yang telah terjadwal dan terkesan kaku. Selain itu, kualitas pengecoran yang ditingkat sehingga hasil pemeliharaan dapat dirasakan masyarakat secara jangka panjang.

3. Adanya permasalahan Komunikasi antar pemerintah provinsi dan kota terkait pelaporan jika ada jalan rusak yang bukan menjadi tanggungjawabnya, maka perlu dilkakukan penguatan komunikasi, terkhusus pada Pemerintah Provinsi dan Kota. Untuk bersinergi melakukan pemeliharaan jalan. Hal ini juga dapat dilakukan untuk mengomunikasikan jika ada laporan atau aduan dari masyarakat terkait kerusakan jalan dan juga adanya komunikasi hasil survei lapangan yang dilakukan Dinas PUPR-PERA Provinsi dan Dinas PUPR-PERA Kota. Sehingga perbaikan jalan dapat dilakukan secara responsif.

### Daftar Pustaka

- Afandi. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Akbar, K. dkk. 2021. “Manajemen POAC Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bdr di SMP negeri 2 Praya Barat daya)”. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1), 167. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.2959>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan (Km), 2014-2020. <https://kaltim.bps.go.id/indicator/17/52/1/panjang-jalan-provinsi-menurut-kondisi-jalan.html>
- Choudhary, S. & Agarwal, P.K., 2013, “An Innovative Strategy for Maintenance of Highway Pavement”. *International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)*, Vol. 3 No. 3, hlm. 54-60. <https://www.semanticscholar.org/paper/An-Innovative-Strategy-for-Maintenance-of-Highway-Choudhary-Agarwal/bb357726fdee41c40d64bf8ca9d8e3c52bcb4f64>
- Dakhi, Y. 2016 “Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu”. *Jurnal Warta Edisi*, Pp. 1–7. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i50.204>
- Febrian, Rangi. 2015. “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan. Teoritis)”. *Jurnal Universitas Islam Riau*, Vol. 1, No 1. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616>
- Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Henriyani, Etin. 2018. “Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah”. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (1), 26-39, 2018. 4. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1081>

- Kamal, M. 2019. “Konsep Dasar Dan Evolusi Pemikiran Manajemen”. *Prosiding Seminar Internasional “Tantangan Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Islam Dan Bahasa Melayu Di Era Revolusi 4.0,”* 351–362.
- Kamil, I. dkk. 2014. “A Study to Develop Critical Success Factors of Roads Maintenance Management System for Sustainable Facility Management”, *Jurnal Teknologi*, Vol. 69 No. 6, hlm. 37-41. <https://doi.org/10.11113/jt.v69.3237>
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Kompas. 2019. Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>
- Laily, E. I. N. 2015. “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif, kebijakan dan manajemen publik”. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 186–190. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp2ded32eef8full.pdf>
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelgensia Media.
- Rusli, Budiman. 2015. *Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Edisi Revisi. Bandung: Mega Rancage Press.
- Sadikin, A dkk. 2020, *Pengantar Manajemen Dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Sarpin, N. & Yang, J., 2012, “The Promotion of Sustainability Agenda for Facilities Management through Developing Knowledge Capabilities”, *Proceedings of APSEC 2012 & ICCER 2012*, hlm. 602-607, Surabaya, Indonesia. <https://core.ac.uk/download/pdf/42956027.pdf>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Yuliani, A.dkk . 2018. “Analisis Tingkat Ketidakrataan Jalan Nasional dengan Menggunakan Alat NAASRA”. *Inersia: Jurnal Teknik Sipil*, 10(2), 13-20. <https://doi.org/10.33369/ijts.10.2.13-20>
- Yulianti, R., & Hasanah, B. 2018. “Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang”. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 111-125. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.926>